

SINOPSIS

Pelayanan transportasi perkotaan dan keadaan fisik bus perkotaan yang sedemikian parah memberi signal kepada Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu Pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi DIY bekerjasama dengan PT Jogja Tugu Trans untuk meremajakan dan memperbaiki sistem transportasi yang ada. Solusi yang diambil Pemerintah adalah dengan mengganti sistem setoran menjadi *buy the service*. Permasalahan mulai muncul ketika pengoperasian bus yang seharusnya sudah bisa dilakukan akhir bulan Desember 2007 ternyata diundur sampai beberapa kali, sampai akhirnya baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Februari 2008. Berhubungan dengan keterlambatan maka yang perlu diperhatikan adalah kematangan rencana dan pelaksanaannya dilapangan. Penulis sempat menyangsikan kematangan rencana pemerintah dan mempertanyakan bagaimana pelaksanaan Trans-Jogja nantinya bisa berjalan dengan baik jika Pemerintah 'belum siap'. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Transportasi Perkotaan dengan Studi Kasus pada kebijakan Trans-Jogja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Kebijakan Trans-Jogja dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Trans-Jogja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan, Wawancara, Dokumentasi dan Obsevasi. Unit analisis terdiri dari Kepala Bappeda, Dinas Perhubungan, dan PT Jogja Tugu Trans, dan menggunakan teknik analisa data Kualitatif Deskriptif.

Penulis menemukan bahwa Trans-Jogja memiliki perencanaan yang benar-benar matang dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti: terpenuhinya kepentingan hampir semua stakeholder walaupun ada kemungkinan terjadi konflik antara pemain lama dan pemain baru karena kenaikan BBM, Trans-Jogja memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan, kesesuaian tujuan dengan pelaksanaan dilapangan, mulai terjadi perbaikan sistem angkutan umum secara berangsur-angsur dan terarah (baik itu dari segi teknis maupun manajemennya), strategi pemerintah yang jitu untuk meminimalisir konflik (pada masa transisi sistem lama kesistem yang baru).

Berkaitan dengan kenaikan BBM penulis merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menaikkan tarif Trans-Jogja, dengan mempertimbangkan keseimbangan beban yang ditanggung oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian jangan sampai sistem yang sudah baik ini nantinya putus ditengah jalan, oleh karena itu perlu keseriusan pemerintah untuk menjalankan rencana awalnya dengan konsisten, minimal untuk tujuh tahun kedepan. Dengan demikian perbaikan sistem transportasi perkotaan secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta